

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN PULAU MOROTAI

2020



Katalog No : 9201001.8207

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN PULAU MOROTAI

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Indikator Ekonomi
Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2020

No. katalog BPS : 9201001.8207
Ukuran Buku : 14.28 cm × 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 38 halaman
Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendaknya Publikasi tahunan “Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penerbitan Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data di Kabupaten Pulau Morotai terutama yang terkait dengan bidang ekonomi.

Publikasi ini berisi data dari beberapa indikator ekonomi. Penyajian publikasi ini berbentuk penjelasan yang disertai dengan tabel, serta ulasan sederhana mengenai perkembangan indikator ekonomi Pulau Morotai selama tahun 2020.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini, selain itu publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

Morotai, September 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pulau Morotai

Heru Agung Santoso, S.ST, M.Stat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I Produk Domestik Regional Bruto	1
BAB II Pertanian sebagai Sektor Utama Perekonomian	11
BAB III Keuangan Daerah.....	17
BAB IV Transportasi Laut dan Udara.....	24
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah).....	2
Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2020	8
Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.....	20
Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.....	21
Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020	22
Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020	23
Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.....	24
Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020.....	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2020	3
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2020	5
Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan <i>share</i> PDRB terbesar tahun 2020.....	6

BAB I

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Indikator ekonomi yang akan diuraikan dalam tinjauan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha meliputi nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Indeks Harga Implisit.

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2016	1.201.896,72	872.948,13
2017	1.318.618,37	927.175,67
2018	1.438.405,88	989.167,35
2019*	1.532.892,54	1.034.459,82
2020**	1.589.161,55	1.062.169,67
*) Angka Sementara		
**) Angka Sangat Sementara		

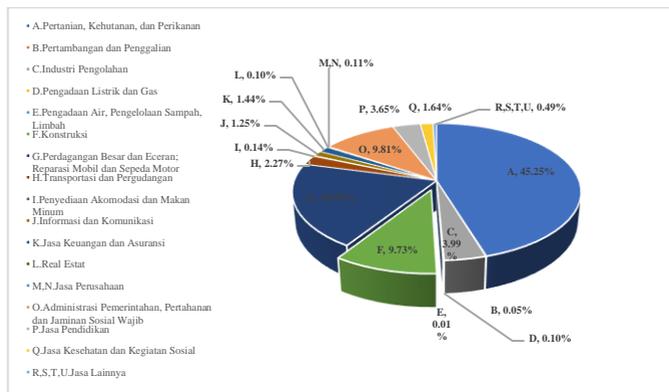
PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga berlaku dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran nilai tambah yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk melihat secara riil besaran nilai tambah yang dihasilkan setelah pengaruh harga dihilangkan.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, dari nilai tambah yang diciptakan, perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2019 mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp. 1,53 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp. 1,43 triliun. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,03 triliun. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 989,1 miliar.

Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 1,58 triliun untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 1,06triliun.

Secara umum, struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2020



Struktur PDRB Kabupaten Pulau Morotai menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 45,25 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,97 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,81 persen.

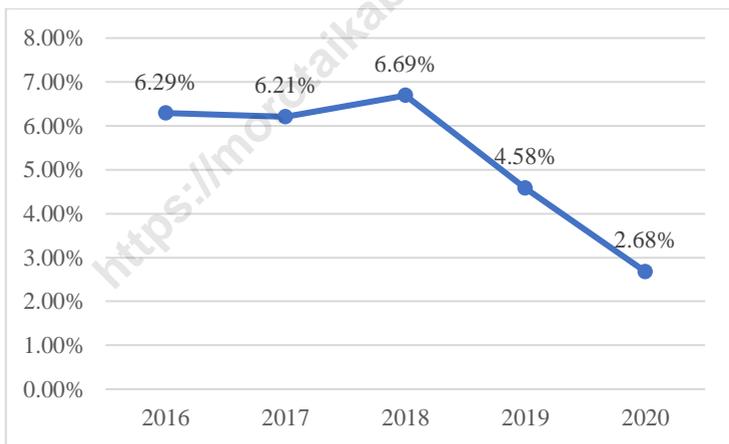
Secara umum peranan masing-masing kategori lapangan usaha selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, cenderung masih berada dikisaran angka yang sama. Secara lebih rinci, besarnya andil masing-masing kategori yang menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berada pada struktur perekonomian yang cenderung sama setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memberi gambaran tentang tingkat ekonomi yang terjadi, dimana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2020 sebesar 2,68 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi cukup bervariasi pada setiap sektor, dimana penurunan yang sangat signifikan terjadi pada 4 sektor yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari sebesar 7,97 persen menjadi -0,05, sektor Transportasi dan

Pergudangan dari sebesar 6,48 persen menjadi -8,07, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari sebesar 7,44 persen menjadi 0,56 dan sektor Jasa Pendidikan dari sebesar 10,01 persen menjadi 3,73. Hal ini kemungkinan besar terjadi akibat adanya penurunan aktivitas ekonomi di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Secara keseluruhan di Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung fluktuatif namun secara agregat pertumbuhan cenderung mengalami perlambatan.

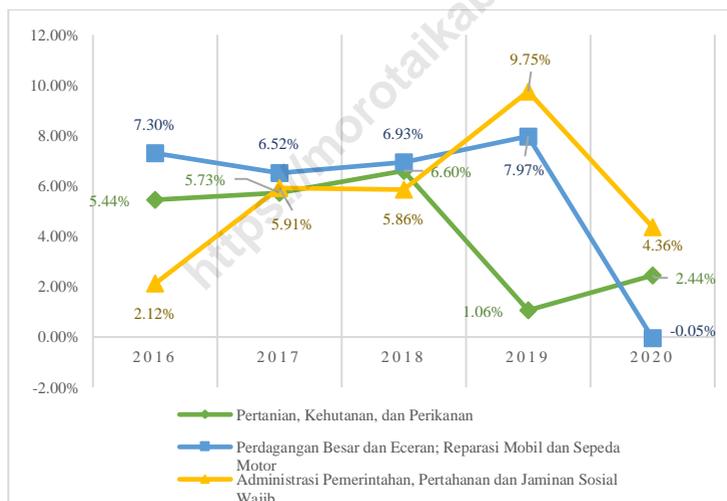
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2020



Besarnya andil suatu kategori terhadap nilai total PDRB suatu daerah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain, pergerakan kategori lapangan usaha yang memiliki andil besar memiliki pengaruh yang besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dominasi tiga lapangan usaha tersebut akan

sangat berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten Pulau Morotai. Laju pertumbuhan untuk kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2020 adalah mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,44 persen, sedangkan untuk Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar -0,05 persen, dan untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib sebesar 4,36 persen menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan *share* PDRB terbesar tahun 2020



Jika melihat pertumbuhan pada masing-masing kategori di tahun 2020, terdapat 8 kategori yang pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai (diatas 2,68 persen), yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Konstruksi, kategori Informasi dan Komunikasi, kategori Jasa

Keuangan dan Asuransi, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, kategori Jasa Pendidikan, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan kategori jasa lainnya.

Sedangkan 9 kategori lainnya berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai diantaranya yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, kategori Jasa Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Transportasi dan Pergudangan, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori Real Estate, dan kategori Jasa Perusahaan. Adapun kategori dengan pertumbuhan yang paling kecil adalah kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -8,07 persen.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan per kapita ini dapat didekati dengan PDRB per kapita. Namun demikian, PDRB per kapita ini tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat.

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Dengan demikian, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapita akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan

jumlah penduduknya banyak maka PDRB per kapita akan menjadi kecil nilainya.

Angka PDRB per kapita dinilai dengan dua cara, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB dapat menggambarkan NTB per kapita yang masih dipengaruhi harga komoditi yang dihasilkan. PDRB per kapita ADHK adalah pertumbuhan nyata ekonomi per kapita, umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan PDRB per kapita akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi.

Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai 2016-2020

Tahun	PDRB Per Kapita	
	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)
2016	19.257.462,02	13.986.863,60
2017	20.603.090,03	14.486.893,46
2018	21.935.947,39	15.084.979,36
2019*	22.782.422,88	15.374.529,15
2020**	23.017.983,00	15.384.844,55

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita penduduk kabupaten Pulau Morotai atas dasar harga berlaku meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 sebesar 19,25 juta rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 20,60 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 21,93 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 22,78 juta rupiah dan tahun 2020 sebesar 23,01 juta rupiah. Akan tetapi kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak riil, karena angka tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. PDRB perkapita yang riil tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pendapatan sebesar 13,98 juta rupiah pada tahun 2016, meningkat di tahun 2017 menjadi sebesar 14,48 juta rupiah, pada tahun 2018 meningkat sebesar 15,08 juta rupiah, meningkat tahun 2019 menjadi sebesar 15,37 dan tahun 2020 mencapai 15,38 juta rupiah.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

<https://morotakab.bps.go.id>

BAB II

PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR UTAMA PEREKONOMIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDRB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan.

Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran hewan ternak (*raising*), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau

sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Sektor pertanian memiliki sumbangan terhadap nilai PDRB kabupaten Pulau Morotai hampir 50 persen. Walaupun andilnya cenderung menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten Pulau Morotai sebesar 45,25 persen. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 45,27 persen. dalam 5 tahun terakhir ini, kontribusi sektor pertanian cenderung mengalami penurunan.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai *intensifikasi*. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi yang berseberangan dengan pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub “ideologi” pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC's berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a. Kontribusi Produk

Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman

b. Kontribusi Pasar

Pembentukan pasar domestik untuk barang industri & konsumsi

c. Kontribusi Faktor Produksi

Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain

d. Kontribusi Devisa

Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Peran sektor pertanian di Indonesia dinilai belum memuaskan, pemerintah justru terkesan menyampingkan masalah sektor pertanian, padahal sebagai negara agraris sektor pertanian Indonesia harusnya menarik perhatian lebih pemerintah dari segi kualitas dan fasilitas yang memadai. Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Semakin majunya sektor pertanian di Indonesia, tentu saja dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada tahun 2020 tanaman padi sawah memiliki luas lahan 1.200 Ha luas panen sebesar 695.07 Ha dan produksi sebesar

3.903,86 Ton. Kemudian, untuk komoditi ubi kayu memiliki luas lahan sebesar 414 Ha dengan luas panen sebesar 390 Ha dan produksi sebesar 4.857,50 Ton.

Pada tahun 2020 kelompok tanaman sayur-sayuran memiliki luas lahan 223 Ha, luas panen sebesar 221 Ha dan produksi sebesar 1649 Ton.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki 4 komoditi unggulan, yaitu kelapa, cengkeh, pala, dan kakao. Pada tahun 2020, tanaman kelapa memiliki luas area 12.900 Ha dan produksi sebesar 10.739 Ton, cengkeh memiliki luas area sebesar 3.856 dan produksi sebesar 109 Ton, pala memiliki luas area sebesar 5.409 Ha dan produksi sebesar 102 Ton,

Terdapat empat jenis ternak di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari sapi, kambing, babi, dan unggas. Jumlah populasi masing-masing jenis ternak pada tahun 2020 secara berurutan sebanyak 9.113 ekor sapi, 10.657 ekor kambing, 5.773 ekor babi, 24.549 ekor ayam buras

Pada tahun 2020 di Kabupaten Pulau Morotai tercatat luas area untuk hutan lindung sebesar 93.201,03 Ha dan Hutan produksi terbatas sebesar 56.481,03 Ha.

BAB III

KEUANGAN DAERAH

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan

efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan maupun pembangunan daerah. Penerimaan daerah Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mendorong peningkatan besaran APBD yang diterima oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat, karena dalam era desentralisasi fiskal ini, penerimaan daerah merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

(BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain yang sah. Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai secara umum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang besar ini tidak lain adalah disebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan (DAU & DAK). Bila dilihat menurut komponen atau sumber penerimaan daerah, maka komponen terbesar dari penerimaan daerah adalah dana perimbangan yang berupa DAU, BHPBP, dan DAK yang memiliki kontribusi sekitar 78.40% dari penerimaan daerah. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sekitar 3,39%. Rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan DAU mengindikasikan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah:

1. Tingkat hidup dan ekonomi masyarakat masih rendah
2. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	Persentase
(1)	(2)	(3)
PAD	25.471.148,66	3.39
Dana Perimbangan	587.703.321,98	78.40
Lainnya	136.409.890,05	18.19
Jumlah	749.584.360,70	100

Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004 komponen PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara umum pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	6.265.317,38	24.59
Retribusi	11.976.957,53	47.02
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	370.201,36	1.45
Lain-lain PAD	6.858.672,38	26.92
Jumlah	25.471.148,66	100

Jumlah keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Besarnya total belanja tidak terlepas dari bagaimana kondisi belanja masing-masing daerah. Adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan dari masing-masing daerah, mengakibatkan prioritas pembangunan dari masing-masing daerah juga berbeda.

Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran		2020
(1)		(2)
A	Belanja Tidak Langsung	353.352.956,61
	Belanja Pegawai	193.506.567,01
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Bantuan Keuangan	115.258.443,14
	Belanja Hibah	3.708.400
	Belanja Bantuan Sosial	3.896.576
	Belanja Tidak Terduga	36.983.000,45
B	Belanja Langsung	535.857.219,88
	Belanja Pegawai	30.434.141,95
	Belanja Barang & Jasa	160.175.993,62
	Belanja Modal	345.247.084,30
Jumlah / Total		889.210.206,50

<https://morotakab.bps.go.id>

BAB IV

TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

Terdapat dua pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Pelabuhan Imam Lastori di Desa Daruba dan Pelabuhan Ferry di Desa Juanga. Dari kedua pelabuhan tersebut kapal yang masuk ke Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 731 unit pada tahun 2020 yang seluruhnya merupakan kapal untuk pelayaran dalam negeri dengan rata-rata kapal yang masuk sekitar 71 sampai 72 kapal untuk setiap bulannya. Kunjungan kapal yang paling banyak terjadi pada bulan Desember 2020 dengan jumlah sekitar 94 kapal. Berdasarkan data Pelabuhan laut tahun 2020 di kabupaten pulau Morotai dapat dilihat bahwa terdapat penurunan signifikan jumlah kapal yang berlabuh dibandingkan tahun lalu sebanyak 122 kapal, hal ini mungkin diakibatkan oleh pembatasan kegiatan ekonomi semasa pandemi COVID-19 tahun 2020.

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	79
Februari	75
Maret	75
April	60
Mei	63
Juni	32
Juli	70
Agustus	71
September	80
Oktober	88
November	70
Desember	94

Pergerakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut di Pulau Morotai pada tahun 2020 cukup mengalami fluktuasi setiap bulannya. Jumlah penumpang yang naik pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebanyak 17.635 orang, sedangkan yang turun dari pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 14.109 orang. Dengan jumlah penumpang paling banyak menggunakan jasa angkutan laut ini pada bulan Desember 2020.

Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Naik	Turun	Naik	Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2.874	1.565		
Februari	2.222	1.968	-29,34	20,48
Maret	1.605	2.232	-38,44	11,83
April	548	553	-192,88	-303,62
Mei	0	0	-	-
Juni	1.410	1.131	100,00	100,00
Juli	772	408	81,74	-177,21
Agustus	1.398	485	44,78	15,88
September	1.118	337	-25,04	-43,92
Oktober	370	1.035	-202,16	67,44
November	2.688	796	86,24	-30,03
Desember	3.899	3.599	31,06	77,88

Selain untuk angkutan penumpang, jasa transportasi laut ini juga menjadi faktor penting dalam perekonomian kabupaten Pulau Morotai yaitu dalam pengangkutan barang. Jumlah barang yang

dibongkar dan muat pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai meningkat tajam sejak adanya tol laut yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2017. Namun, pemanfaatan tol laut belum terlalu signifikan dampaknya terhadap perekonomian.

Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	10.499	160		
Februari	2.364	89	-344.12	-79.78
Maret	8.429	387	71.95	77.00
April	3.266	276	-158.08	-40.22
Mei	10.966	247	70.22	-11.74
Juni	523	282	-1.996.75	12.41
Juli	2.251	3.335	76.77	91.54
Agustus	5.447	240	58.67	-1.289.58
September	3.055	367	-78.30	34.60
Oktober	15.734	1.396	80.58	73.71
November	1.214	823	-1.196.05	-69.62
Desember	9.553	416	87.29	-97.84

Selain transportasi laut, Kabupaten Pulau Morotai dapat diakses melalui jalur Transportasi Udara. Di Kabupaten Pulau Morotai terdapat satu bandara yaitu Bandara Pitu yang terletak di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan. Jasa angkutan udara untuk umum pada tahun 2017 baru dimulai bulan April. Pada tahun

sebelumnya memang sudah ada penerbangan untuk Morotai-Ternate, namun dengan pesawat yang hanya bermuatan 10 penumpang. Namun semasa pandemic COVID-19 penerbangan di Morotai berhenti untuk sementara.

<https://morotai.kab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://morotai.kab.bps.go.id>

Lampiran 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	678.230,23	693.947,12	719.049,33
B	Pertambangan dan Penggalian	791,58	827,76	862,90
C	Industri Pengolahan	62.961,53	63.425,86	63.410,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.325,21	1.424,24	1.545,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	193,75	191,09	195,55
F	Konstruksi	124.902,39	140.096,29	154.614,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	282.545,82	314.841,50	317.317,02
H	Transportasi dan Pergudangan	35.140,62	38.610,75	36.072,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.052,00	2.247,56	2.276,23
J	Informasi dan Komunikasi	16.815,44	18.279,54	19.866,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.531,43	21.338,89	22.867,00
L	Real Estate	1.479,01	1.539,39	1.566,05
M,N	Jasa Perusahaan	1.545,01	1.646,70	1.716,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	130.669,93	148.475,98	155.819,88
P	Jasa Pendidikan	49.701,33	54.898,18	58.045,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22.716,26	23.785,91	26.085,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.804,34	7.315,76	7.850,98
PDRB		1.438.405,88	1.532.892,54	1.589.161,54

Lampiran 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	455.467,61	460.272,97	471.483,37
B	Pertambangan dan Penggalian	540,84	550,01	558,29
C	Industri Pengolahan	48.313,43	48.248,03	47.771,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	991,33	1.062,72	1.144,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	149,55	147,17	149,24
F	Konstruksi	85.302,73	93.804,29	103.179,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199.527,07	215.420,47	215.322,51
H	Transportasi dan Pergudangan	23.851,96	25.398,40	23.347,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.322,07	1.420,42	1.428,43
J	Informasi dan Komunikasi	13.422,43	14.642,71	15.978,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.670,43	13.861,76	15.008,14
L	Real Estate	1.138,50	1.167,92	1.178,19
M,N	Jasa Perusahaan	1.133,54	1.181,69	1.209,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	86.259,67	94.670,05	98.798,41
P	Jasa Pendidikan	37.123,53	40.839,65	42.361,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.517,60	15.956,45	17.080,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.435,05	5.815,10	6.170,40
PDRB		989.167,35	1.034.459,82	1.062.169,66

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,15	45,27	45,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	4,38	4,14	3,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,68	9,14	9,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,64	20,54	19,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2,44	2,52	2,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,15	0,14
J	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,19	1,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43	1,39	1,44
L	Real Estate	0,10	0,10	0,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,08	9,69	9,81
P	Jasa Pendidikan	3,46	3,58	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,55	1,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,47	0,48	0,49
PDRB		100	100	100

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 (persen)

Kategori	Uraian	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,60	1,06	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian	6,72	1,69	1,51
C	Industri Pengolahan	1,22	-0,14	-0,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,11	7,20	7,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,90	-1,59	1,41
F	Konstruksi	9,96	9,97	9,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	7,97	-0,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,49	6,48	-8,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,72	7,44	0,56
J	Informasi dan Komunikasi	6,16	9,09	9,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	1,40	8,27
L	Real Estate	5,70	2,58	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	5,49	4,25	2,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,86	9,75	4,36
P	Jasa Pendidikan	10,02	10,01	3,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,62	2,83	7,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,14	6,99	6,11
PDRB		6,69	4,58	2,68

Lampiran 5. Laju Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018-2020 (%)

Kategori	Uraian	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,07	1,25	1,15
B	Pertambangan dan Penggalian	5,27	2,83	2,70
C	Industri Pengolahan	2,41	0,87	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	0,25	0,81
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,37	0,22	0,91
F	Konstruksi	4,58	2,00	0,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,11	3,21	0,83
H	Transportasi dan Pergudangan	2,50	3,18	1,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,54	1,95	0,71
J	Informasi dan Komunikasi	4,31	-0,35	-0,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,22	2,50	-1,02
L	Real Estate	3,17	1,46	0,84
M,N	Jasa Perusahaan	3,74	2,24	1,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,05	3,53	0,56
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,41	1,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,62	1,83	2,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,56	0,49	1,14
PDRB		2.25	1.90	0.97

Lampiran 6. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	Persentase
(1)	(2)	(3)
PAD	35.589,76	4,28
Dana Perimbangan	656.532,57	78,97
Lainnya	139.194,29	16,74
Jumlah	831.316,61	100

Lampiran 7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2020

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	6.265.317,38	24.59
Retribusi	11.976.957,53	47.02
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	370.201,36	1.45
Lain-lain PAD	6.858.672,38	26.92
Jumlah	25.471.148,66	100

Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis
pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran		2020
(1)		(2)
A	Belanja Tidak Langsung	353.352.956,61
	Belanja Pegawai	193.506.567,01
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Bantuan Keuangan	115.258.443,14
	Belanja Hibah	3.708.400
	Belanja Bantuan Sosial	3.896.576
	Belanja Tidak Terduga	36.983.000,45
B	Belanja Langsung	535.857.219,88
	Belanja Pegawai	30.434.141,95
	Belanja Barang & Jasa	160.175.993,62
	Belanja Modal	345.247.084,30
Jumlah / Total		889.210.206,50

Lampiran 9. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	79
Februari	75
Maret	75
April	60
Mei	63
Juni	32
Juli	70
Agustus	71
September	80
Oktober	88
November	70
Desember	94

Lampiran 10. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Naik	Turun	Naik	Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	2.874	1.565		
Februari	2.222	1.968	-29,34	20,48
Maret	1.605	2.232	-38,44	11,83
April	548	553	-192,88	-303,62
Mei	0	0	-	-
Juni	1.410	1.131	100,00	100,00
Juli	772	408	81,74	-177,21
Agustus	1.398	485	44,78	15,88
September	1.118	337	-25,04	-43,92
Oktober	370	1.035	-202,16	67,44
November	2.688	796	86,24	-30,03
Desember	3.899	3.599	31,06	77,88

Lampiran 11. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020

Bulan	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	10.499	160		
Februari	2.364	89	-344.12	-79.78
Maret	8.429	387	71.95	77.00
April	3.266	276	-158.08	-40.22
Mei	10.966	247	70.22	-11.74
Juni	523	282	-1.996.75	12.41
Juli	2.251	3.335	76.77	91.54
Agustus	5.447	240	58.67	-1.289.58
September	3.055	367	-78.30	34.60
Oktober	15.734	1.396	80.58	73.71
November	1.214	823	-1.196.05	-69.62
Desember	9.553	416	87.29	-97.84

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jl. Hi. Ahmad Syukur, Desa Daruba, Morotaj Selatan, Pulau Morotai
Telp. (923) 2221133 Homepage: <http://morotaikab.bps.go.id>
Email: bps8207@bps.go.id